



Dinamika Produksi Beras dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 1984-1998

Lisa Novia Handani[✉], Wasino, Abdul Muntholib

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2017
Disetujui September 2017
Dipublikasikan Oktober 2017

Keywords:

rice, Grobogan, food, agriculture.

Abstrak

Kabupaten Grobogan adalah kabupaten terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Cilacap. Sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, terutama pertanian padi. Padi menjadi komoditas utama karena karakteristik yang unik, padi sebagai makanan pokok, dan harga jual mendukung. Pemerintah membangun KUD, penyuluh pertanian, dan subsidi pupuk. Produksi beras di Kabupaten Grobogan selalu meningkat setiap tahun, produksi tertinggi pada tahun 1998 dan masyarakat Kabupaten Grobogan dapat dikatakan tahan pangan.

Abstract

Grobogan District is the second largest district in Central Java after Cilacap. Most of Grobogan Regency is used as agricultural land, especially rice farming. Rice became the main commodity because of its unique characteristics, rice as staple food, and selling price support. The government builds KUD, agricultural extension agents, and fertilizer subsidies. Rice production in Grobogan Regency always increases every year, the highest production in 1998 and Grobogan Regency people can be said to be food resistant.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Padi menjadi komoditas ekspor yang penting bagi VOC, pada sekitar tahun 1790-an ada instruksi dari Batavia bahwa para residen harus mengingatkan para bupati di daerahnya untuk memerintahkan para petani untuk mengerjakan sawah lebih awal. Data pada sekitar tahun 1800 menyatakan bahwa semua petani pembayar pajak harus membayar dalam bentuk barang (padi) untuk jatah daerah mereka. Padi merupakan upeti yang dituntut Kompeni kepada para bupati (Wasino dalam Margono, 2010:30). Pada masa Politik Kolonial Liberal penggunaan lahan masih melanjutkan tradisi selama Tanam Paksa, bedanya pada masa Tanam Paksa eksploitasi lahan dilakukan oleh birokrasi pemerintahan sementara pada masa Politik Kolonial Liberal, eksploitasi dilakukan oleh pengusaha swasta. Peningkatan produksi pertanian padi terus terjadi sejak masa Politik Kolonial Liberal dikarenakan saluran irigasi yang semakin membaik, namun hingga berakhirnya Politik Kolonial Liberal tujuan pemerintah Kolonial adalah untuk memperkaya negara induk yang menyebabkan rakyat Indonesia sengsara (Wasino, 2017:84-86).

Tahun 1942-1943 Jepang menguasai Indonesia, politik agraria pada jaman penguasaan Jepang dipusatkan pada penyediaan bahan makanan untuk perang. Pihak Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi 'perang' Jepang, disamping itu rakyat harus menyerahkan 20% hasil tanaman padinya kepada pemerintahan Jepang, tidak hanya itu rakyat juga dituntut untuk membantu Jepang sebagai *romusha*, tenaga kerja paksa tanpa bayaran (Rachman, 2017:49). Tahun 1960, pemerintahan 'Demokrasi Terpimpin' mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar-dasar hukum agraria nasional. Tujuan dibentuknya UUPA antara lain adalah: (1) meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; (2)

meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria; (3) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat (Rachman, 2017:69-70).

Indonesia perlahan tumbuh menjadi negara berkembang, sebagai negara berkembang Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor. Kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia dikenal dunia sebagai negara agraris. Sebagai negara Agraris Indonesia memiliki kekayaan alam yang terhampar luas yang berupa lahan pertanian, hutan, dan lautan. Kekayaan SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia menjadi elemen yang penting dalam mengupayakan pembangunan ekonomi, Indonesia melakukan menerapkan serta melaksanakan upaya-upaya demi mencapai kestabilan ekonomi.

Tahun 1965 Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi. Laju inflasi meningkat, faktor utama peningkatan inflasi ini adalah beras. Beras sebagai komoditi yang langsung menguasai hajat hidup rakyat, maka rakyat bersama-sama kaum intelektual menuntut adanya Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) untuk memperbaiki keadaan. Salah satu poin penting dari Tritura adalah "turunkan harga beras". Jika mengacu pada tuntutan tersebut, maka terlihat betapa pentingnya beras. Beranjak dari kasus tahun 1965 tersebut menunjukkan bahwa masalah politik pangan mengalami kemunduran. Untuk itulah Orde Baru melalui stabilisasi ekonomi berusaha meletakkan dasar-dasar politik pangan. (Baha'udin dalam Margono, 2010:209). Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. (Tambunan, 2003:9)

Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi yang lebih serius dan terencana dengan baik di Indonesia baru dimulai sejak pelaksanaan Repelita I tahun 1969, dan prosesnya berjalan

mulus hingga tahun 1984 Indonesia dipuncak masa pembangunan perekonomian. Tujuan dari pengembangan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, termasuk dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan dasar, pangan menjadi titik perhatian setiap penguasa untuk menjaga ketersediaan pangan (Wasino dalam Margono, 2010:26). Kemampuan Indonesia meningkatkan produksi pertanian untuk swasembada dalam penyediaan pangan sangat ditentukan oleh banyak faktor, eksternal maupun dalam penyediaan pangan sangat ditentukan oleh banyak faktor, eksternal maupun internal. Satu-satunya faktor eksternal yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia adalah iklim; walaupun dengan kemajuan teknologi saat ini pengaruh negatif dari cuaca buruk terhadap produksi pertanian bisa diminimalisir. Faktor iklim biasanya dilihat dalam bentuk curah hujan. Sedangkan faktor-faktor internal, dalam arti bisa dipengaruhi oleh manusia, diantaranya yang paling penting adalah luas tanah, bibit, berbagai macam pupuk (seperti urea, TSP, dan KCL), pestisida, ketersediaan dan kualitas infrastruktur termasuk irigasi, jumlah dan kualitas SDM (Tambunan, 2003:224).

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terbesar di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Grobogan memiliki cukup banyak potensi untuk dikembangkan dalam mendukung perekonomian daerah Kabupaten Grobogan, salah satunya pertanian. Akhir-akhir ini konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian semakin bertambah, tetapi sampai saat ini potensi sektor pertanian masih dominan dalam menunjang sektor ekonomi di Kabupaten Grobogan. (Sriutomo, 2015:3). Kondisi fisik yang ada di Kabupaten Grobogan, terutama jenis tanah sangatlah mempengaruhi kualitas dan kuantitas komoditas tanaman pangan yang dihasilkan oleh

Kabupaten Grobogan. Secara umum tanah di Kabupaten Grobogan didominasi oleh tanah dengan kadar liat yang tinggi, sehingga akan retak jika kondisinya kering dan becek ketika kondisinya basah. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar wilayah di Kabupaten Grobogan mengalami kekeringan jika musim kemarau dan mengalami banjir pada musim penghujan. Kondisi seperti ini tentunya sangat berpengaruh dan berpotensi mengganggu kestabilan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Grobogan, terutama pertanian tanaman pangan. Berdasarkan faktor di atas, maka pembangunan daerah Kabupaten Grobogan perlu dilakukan secara bertahap dan dapat mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional yaitu pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan industri akan terus dikembangkan dalam Pelita-Pelita berikutnya. (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 1985:45).

Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan kelangsungan suatu kabinet pemerintah atau stabilitas politik di dalam negeri apabila Indonesia terancam kekurangan pangan atau kelaparan (Tambunan, 2003:208). Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 tentang pangan, pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa (Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan Rumah Tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". (Undang-Undang Ketahanan Pangan 1996).

Kebijakan mengenai pangan menjadi hal yang sangat penting karena dalam menghadapi segala kemungkinan, sebuah negara diharuskan mampu mencukupi kebutuhan pangannya dari sumber-sumber yang tersedia dan dikuasai oleh negara itu. Dasar pemikiran itu disertai belajar dari sejarah dijadikan oleh pemerintah Orde Baru

sebagai faktor ketersediaan atau kecukupan pangan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunannya (Margono, 2010:210).

Indonesia memiliki siklus iklim sepuluh tahun yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa di beberapa daerah yang pada awal tahun 1972 pada awal tahun dan disusul dengan kemarau yang sangat kering. Hal ini yang menyebabkan rusaknya tanaman padi dan berakhir dengan kegagalan panen, tidak hanya tanaman padi, namun juga tanaman palawija lainnya seperti jagung juga mengalami kerusakan. (Baha'udin dalam Margono, 2010:240). Kabupaten Grobogan ikut mengalami krisis beras nasional ini. Seperti yang kita ketahui bahwa komoditas pertanian yang utama di Kabupaten Grobogan adalah padi, yang merupakan makanan pokok masyarakatnya. Krisis beras nasional yang melanda tidak selamanya membuat Indonesia terpuruk dalam sektor pertanian, pada tahun 1984 Soeharto menyatakan Indonesia swasembada beras, yang artinya produksi beras nasional sudah mencukupi kebutuhan pangan penduduk, kemudian pada tahun 1985, Soeharto mewakili Indonesia menyerahkan 100.000 ton padi sumbangan para petani Indonesia kepada korban kelaparan di Afrika. Sejak masa kejayaan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan, produksi beras terus mengalami dinamika yang tidak menentu setiap tahunnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, metode sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah (Wasino, 2007:9). Metode penelitian sejarah melalui kajian pustaka dalam bentuk buku maupun dokumen dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Grobogan dan Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis secara kritis dinamika produksi padi di wilayah Kabupaten Grobogan tahun 1984-1998. Sebagai penelitian sejarah, maka didalam memaparkan hasil penelitian, peneliti melakukan empat langkah pokok, yaitu *heuristik*, dengan cara

mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan fokus penelitian, seperti buku, , dokumen dari BPS Kabupaten Grobogan dan BPS Jawa Tengah, dan wawancara dengan Petani padi Kabupaten Brebes, staff Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 1978-2002, ketua Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 1988-1996, dan sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan. *Kedua*, kritik sumber sumber dengan cara melakukan verifikasi data atau menyeleksi data-data sejarah yang telah dikumpulkan melalui kritik internal dan eksternal. *Ketiga*, melakukan interpretasi, dengan cara menafsirkan fakta-fakta sejarah, sehingga terbentuk rangkaian fakta yang sesuai dengan urutan peristiwa satu dengan yang lainnya. *Keempat*, adalah tahapan historiografi. Dalam historiografi inilah penulis melakukan penyusunan fakta-fakta sejarah dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan konsisten sehingga pembahasannya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Padi Sebagai Komoditas Utama Sektor Pertanian di Kabupaten Grobogan

Karakteristik tanah yang unik ditambah dengan wilayah yang luas didukung dengan jumlah SDM yang mendukung menjadikan Kabupaten Grobogan sebagai daerah yang memiliki berbagai komoditi dalam sektor pertanian. Hasil pertanian Kabupaten Grobogan meliputi padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, cabai, terong, tomat, kangkung, bayam, hingga buah-buahan. Dari tahun ke tahun hasil produksi pertanian mengalami kenaikan dan penurunan produksi yang tidak stabil, kecuali padi yang produksinya selalu meningkat sejak tahun 1985 (Wawancara Lilik Agung, 27 Juli 2017). Pencapaian Indonesia sebagai negara swasembada pangan menjadikan motivasi Pemerintah untuk terus meningkatkan produksi padi. Wilayah pertanian yang luas menjadikan Kabupaten Grobogan sasaran perhatian Pemerintah untuk merubah pola tanam. Sebelum dibangunnya irigasi tehnis masyarakat petani memiliki pola tanam Palawija-

Palawija-Padi. Hal inilah yang menjadikan produksi jagung lebih banyak dibandingkan produksi padi. Tahun 1985 Pemerintah membangun Waduk Kedung Ombo. (wawancara Lilik Agung, 27 Juli 2017). Adanya waduk kedung ombo memberikan manfaat yang sangat besar bagi petani. Pola tanam berubah menjadi Padi-padi-palawija, petani tidak lagi khawatir sawah tidak teraliri air.

Selama Pelita V dan IV Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan berbagai upaya terpadu guna meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi dengan tahap memperhatikan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup (Pekab Grobogan, 2002:19). Usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Grobogan memberikan hasil yang tidak percuma, pertumbuhan produksi padi terus meningkat sejak tahun 1989 hingga tahun 1998 dibandingkan dengan hasil pertanian yang lainnya, pertumbuhan produksi padi selama tahun 1989 sampai tahun 1993 sebanyak 7,32%. Pada Pelita VI produksi meningkat kembali menjadi 15,66%, hasil yang memuaskan bagi pemerintah dan petani. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadikan padi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Grobogan.

1. Karakteristik Padi Unik. Tanaman padi tergolong tanaman yang unik, tanaman ini bisa tumbuh di daerah mana saja, mulai dari daerah tropis sampai daerah subtropis di dataran rendah hingga dataran tinggi (Khudori, 2008:2). Kondisi geografis Kabupaten Grobogan yang diapit dua pegunungan Kendeng yang menjadikan Kabupaten Grobogan memiliki relief pegunungan kapur serta perbukitan sangat cocok untuk ditanami padi, meskipun daerah Grobogan cenderung cukup sulit air bersih namun pertanian padi tumbuh subur dan melimpah di daerah ini karena dibantu dengan saluran irigasi dari Waduk Kedung Ombo yang terletak di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan (BPS Kab Grobogan, 1996:3).

2. Padi Sebagai Makanan Pokok. Masyarakat petani Kabupaten Grobogan lebih memilih padi sebagai prioritas tanam pada setiap tahun karena padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sebagai makanan pokok beras menjadi sangat penting dikalangan masyarakat, sehingga membuat sebagian besar petani Grobogan lebih memilih pola tanam padi-padi-palawija dalam satu tahun, maka produksi padi jelas lebih banyak dibandingkan dengan produksi pertanian lainnya.. Meskipun masyarakat Grobogan memiliki kearifan lokal yaitu terbiasa mengkonsumsi makanan nasi jagung, namun setelah adanya Waduk Kedung Ombo yang dibangun pada tahun 1985 masyarakat lebih mudah dalam menanam padi dan daya tarik konsumsi beras meningkat (wawancara Lilik Agung, 27 Juli 2017).

3. Harga Jual Mendukung. Tingginya permintaan akan beras menjadikan ladang yang menguntungkan bagi petani padi, jika dibandingkan dengan bahan makanan pokok lainnya seperti jagung harga jual padi tetap unggul dan stabil, hal ini yang menjadikan petani di Kabupaten Grobogan lebih memilih menanam padi dibandingkan tanaman lainnya. Padi memiliki jangkauan yang luas karenanya padi mudah untuk dipasarkan, di Kabupaten Grobogan memiliki 3 perusahaan penampung beras yang cukup besar yaitu Joni, Dolog, dan Wiguno. Dolog merupakan penampung beras yang berhubungan langsung dengan Bulog (Wawancara Sudharsono, 27 Juli 2017).

Peran Pemerintah dalam Pertanian Padi di Kabupaten Grobogan

Pemerintah "Orde Baru" menerapkan serangkaian Pembangunan Berencana Lima Tahun (Pelita), ditunjukkan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat miskin dan menciptakan pembangunan ekonomi yang seimbang. Pertanian untuk pengamanan pangan dan produksi komoditas ekspor dijadikan sektor prioritas, Rencana Pembangunan ini secara rutin dilakukan setiap lima tahun. Melalui Repelita dirancang berbagai strategi dan kebijakan bagi

terciptanya pembangunan ekonomi melalui pertanian. Pada tahun 1970 Program Bimas Nasional yang Disempurnakan (BND) di resmikan sebagai perwujudan dari rangkain Repelita. Tujuan dari sistem BND adalah mengganti sistem kredit kelompok dengan sistem kredit untuk petani secara individu (Oudejans, 2006:60). Selain BND pemerintah mengeluarkan program khusus Intensifikasi padi yang disebut Insus (Instensifikasi Khusus), petani dikelompokkan menurut unit produksi berdasarkan petak-petak pengairannya. Kelompok tani yang menentukan jenis/varietas padi, pupuk dan pestisida yang paling cocok untuk wilayah mereka, sementara Departemen Pertanian memberikan penyuluhan dan fasilitas kredit.

Untuk memaksimalkan penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah membentuk BPP (Badan Penyuluh Pertanian), BPP memiliki Penyuluh-Penyuluh Lapangan (PPL) yang bertugas memberikan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok tani, setiap kelompok tani setidaknya mendapatkan penyuluhan sebanyak satu kali dalam sebulan (Wawancara Sudharsono, 27 Juli 2017). Penyuluhan pertanian tetap memainkan peran yang penting dalam memperbaiki sektor pertanian. Kontak langsung dapat diadakan langsung dengan para petani. Pada prinsipnya, penyuluhan pertanian ini merupakan alat fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda, bahkan juga dapat berorientasi dengan baik, bahkan juga dapat berorientasi dengan baik pada kelompok sasaran khusus (Bechtold, 1988:18).

Program BND dan Insus berjalan hingga akhirnya pada November tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada pangan. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus mengimpor beras dari luar negeri. Seiring dengan pencapaian tersebut pemerintah semakin menaruh perhatian terhadap produksi padi. Air merupakan faktor terpenting dalam pemeliharaan pertanian padi, di daerah irigasi yang direncanakan secara ilmiah, bendungan dibangun sedemikian rupa sehingga bisa tahan

terhadap banjir besar (Wasino, dkk, 2017:73). Tahun 1985 Waduk Kedung Ombo dibangun sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan pengairan di Kabupaten Grobogan, sejak dibangun Waduk Kedung Ombo, dibentuk Panitia Pengatur Pembagian Air (P3A) yang bertugas mengatur pembagian pengairan ke sawah-sawah petani (Wawancara Sudharsono, 27 Juli 2017).

Pemerintah pusat juga mengembangkan koperasi karena mutlak diperlukan sebagai wadah yang paling tepat untuk mengumpulkan kekuatan ekonomi rakyat. Di setiap kecamatan dibangun Koperasi Unit Desa (KUD), KUD menjadi penghubung petani dengan pemerintah secara langsung dalam bidang perdagangan dan perkoperasian. Petani bisa menjual hasil panen kepada KUD, petani juga bisa mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. KUD yang ada di Kabupaten Grobogan hingga tahun 1998 berjumlah 24 KUD yang tersebar di 19 kecamatan.

Dinamika Produksi Beras dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 1984-1998

Beras memiliki karakteristik yang unik yang menjadikan beras sebagai bahan pangan penting. Beras memiliki kandungan yang penting bagi tubuh, antara lain vitamin dan mineral, selain itu beras juga mengandung karbohidrat yang mudah dicerna. Teknologi pemrosesan, pengolahan, dan penyimpanannya mudah. Beras bisa tumbuh mulai di daerah tropis sampai daerah subtropis, di dataran rendah hingga dataran tinggi. Beras bisa pula dibudidayakan baik secara tradisional maupun dengan metode non tradisional. Bagian vegetatifnya bisa dimanfaatkan untuk pakan, pupuk organik, dan bahan baku industri (Khudori, 2008:2). Tahun 1985 Waduk Kedung Ombo secara resmi dibuka sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan pengairan di Kabupaten Grobogan, sejak dibangun Waduk Kedung Ombo dibentuk pula Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang bertugas mengatur pembagian pengairan ke sawah-sawah petani (Wawancara Sudharsono, 27 Juli 2017).

Produksi padi terus berkembang dan menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Grobogan.

Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan dinamika produksi beras serta perkembangan luas panen di Kabupaten Grobogan sejak tahun 1984-1998.

Tabel 1. Dinamika luas panen, hasil perhektar, dan produksi beras di Kabupaten Grobogan tahun 1984-1998

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Hasil / Hektar (Kw)	Produksi (Ton)
1	1984	78.742	31,56	248.383,02
2	1995	79.500	30,74	244.383,02
3	1986	79.970	31,18	249.368,24
4	1987	73.811	32,40	239.131,74
5	1988	73.770	32,50	239.777,01
6	1989	78.614	33,03	259.691,96
7	1990	78.189	33,39	261.045,71
8	1991	79.846	34,10	273.316,79
9	1992	82.590	33,75	279.373,79
10	1993	81.992	33,98	278.707,58
11	1994	85.073	34,01	289.373,84
12	1995	85.297	33,89	289.075,54
13	1996	88.315	34,91	308.318,67
14	1997	90.336	34,92	315.546,22
15	1998	98.568	33,96	334.712,89

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah tahun 1984-1990 & BPS Kab. Grobogan tahun 1991-1998

Pengumpulan data luas panen adalah menggunakan metode pelaporan secara lengkap dengan registrasi pada setiap kecamatan secara rutin sebagai laporan bulanan. Luas panen kabupaten merupakan rekapitulasi laporan luas panen per kecamatan, sedangkan luas panen propinsi merupakan rekapitulasi luas panen per kabupaten (BPS Jateng, 2002:iii). Tabel diatas menunjukkan perkembangan luas panen sangat berpengaruh terhadap jumlah hasil produksi beras di Kabupaten Grobogan.. tahun 1984 sampai tahun 1988 produksi beras memang cukup tinggi namun mengalami pertumbuhan yang tidak stabil dikarenakan luas panen yang tidak stabil pula. Pada akhir tahun 1988 hingga tahun-tahun berikutnya produksi beras mulai mngelami peningkatan yang stabil. . Pada tahun 1971 dilepaskan varietas Pelita I-1 dan Pelita I-2 di Kabupaten Grobogan. Varietas Pelita-1 dan

Pelita-2 habis terkena hama wereng coklat pada tahun 1974, kemudian diganti dengan IR-64. Setelah bencana wereng coklat, varietas banyak diminati petani adalah IR-64, karena pohonnya yang pendek namun memiliki biji yang lebat (Wawancara Margini, 5 Agustus 2017).

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dan produksi padi yang menentukan rata-rata konsumsi beras per hari masyarakat di Kabupaten Grobogan sejak tahun 1984-1998.

Tabel 2. Jumlah penduduk dan produksi beras Kabupaten Grobogan tahun 1984-1998

No	Tahun	Jumlah	Produksi Beras (Ton)	Konsumsi/ tahun (Kg)	Konsumsi/ hari
					(Ons)
1	1984	1.083.739	248.383,02	229,19	6,3
2	1985	1.103.062	244.383,02	221,55	6,1
3	1986	1.117.160	249.368,24	223,22	6,1
4	1987	1.131.958	239.131,74	211,25	5,8
5	1988	1.146.527	239.777,01	209,13	5,7
6	1989	1.161.477	259.691,96	223,59	6,1
7	1990	1.186.448	261.045,71	220,02	6,0
8	1991	1.189.279	273.316,79	229,82	6,3
9	1992	1.202.243	279.373,79	232,34	6,4
10	1993	1.218.491	278.707,58	228,73	6,3
11	1994	1.240.404	289.373,84	233,29	6,4
12	1995	1.254.337	289.075,54	230,46	6,3
13	1996	1.271.693	308.318,67	242,44	6,6
14	1997	1.283.324	315.546,22	245,88	6,7
15	1998	1.295.428	334.712,89	258,38	7,1

Sumber: BPS Prov. Jateng tahun 1984-1990 & BPS Kab. Grobogan tahun 1991-1998

Tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 1984 hingga 1998 pertumbuhan penduduk selalu meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya produksi beras yang stabil, jika jumlah produksi dibagi jumlah penduduk hasilnya adalah rata-rata konsumsi beras setiap masyarakat pertahun. Hasil konsumsi pertahun kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam setahun, menghasilkan rata-rata konsumsi beras masyarakat Kabupaten Grobogan per hari. Ketersediaan beras menjadi faktor yang paling

penting dalam menentukan ketahanan pangan masyarakat.

Syarat masyarakat dikatakan tahan pangan adalah konsumsi karbohidrat berupa beras sebanyak minimal 3 ons per hari (Wawancara Lilik Agung, 27 Juli 2017). Seluruh produksi beras yang dihasilkan petani Kabupaten Grobogan apabila dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Grobogan maka selama 15 tahun (1984-1998) rata-rata konsumsi beras masyarakat per hari adalah sebanyak 6,28 ons, angka ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Petani Kabupaten Grobogan tidak mengkonsumsi secara pribadi semua hasil panen padi, namun sebagian dijual dan sebagian di simpan untuk kebutuhan makan sehari-hari hingga panen berikutnya. Hasil panen tidak hanya dijual ke daerah setempat, ada juga yang dijual ke luar, jika hasil separuh jumlah hasil panen di distribusikan ke luar daerah dan separuhnya di konsumsi masyarakat Kabupaten Grobogan maka rata-rata konsumsi beras masyarakat yang semula sebesar 6,28 Ons per hari dikalikan $\frac{1}{2}$ menjadi 3,14 Ons per hari. Konsumsi beras masyarakat sebesar 3,14 Ons masih sangat wajar karena masih memenuhi syarat kebutuhan karbohidrat dari beras per hari. Mengidentifikasi Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori tahan pangan.

Produksi beras di tengah masyarakat Kabupaten Grobogan secara langsung atau tidak langsung tela membawa pengaruh atau dampak terhadap keadaan ekonomi masyarakat setempat. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat Kabupaten Grobogan adalah terbentuknya lapangan pekerjaan terutama untuk petani dan buruh tani. Terbentuknya lapangan pekerjaan secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran bagi masyarakat Kabupaten Grobogan sehingga sedikit banyak membantu perekonomian masyarakat. Lapangan pekerjaan yang lain dari produksi beras adalah munculnya tengerkulak-tengerkulak baru dan selepan-selepan di sekitar desa-desa di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudharsono, dampak ekonomi pertanian padi mengalami perkembangan yang pesat karena padi sebagai makanan pokok dan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya yang ditanam di Kabupaten Grobogan, didukung dengan irigasi teknis yang dikembangkan oleh Pemerintah yang menjadikan produksi padi/beras semakin berkembang di Kabupaten Grobogan. Kondisi perberasan di Kabupaten Grobogan mulai mengalami perubahan kondisi dimulai pada tahun 1985, puncak kesuksesan produksi beras terjadi pada tahun 1998 (Sudharsono, 27 Juli 2017).

Peningkatan perekonomian masyarakat merupakan hal yang penting dalam pemenuhan pangan masyarakat, jika bahan pangan tersedia di lingkungan namun masyarakat terutama yang tidak memiliki lahan sawah tidak memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan pangan maka sama saja bahwa syarat masyarakat dikatakan tahan pangan tidak mampu terpenuhi. Inilah mengapa sektor pertanian yang semakin berkembang memberikan manfaat tidak hanya kepada petani yang memiliki tanah persawahan, tetapi juga buruh tani dan elemen masyarakat yang terlibat dalam produksi beras itu sendiri.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menjadikan padi berkembang pesat dan menjadi komoditas utama produksi pertanian di Kabupaten Grobogan adalah: (1) padi memiliki karakteristik yang unik karena dapat tumbuh di mana saja, (2) padi merupakan bakal makanan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. (3) Harga jual padi lebih tinggi dibandingkan harga bahan pangan lainnya.

Pemerintah berperan penting dalam peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Grobogan, terutama padi. Pada tahun 1984 Pemerintah membangun Waduk Kedung Ombo sebagai pusat irigasi. Pembangunan KUD, Badan Penyuluh Pertanian (BPP), serta subsidi pupuk dan obat.

Tahun 1984-1988 produksi padi di Kabupaten Grobogan masih mengalami kenaikan dan penurunan namun dengan selisih angka yang sangat sedikit, setelah tahun 1988 produksi beras terus meningkat. Puncak pencapaian produksi tertinggi adalah tahun 1998. Produksi beras dan pertumbuhan penduduk menunjukkan angka yang stabil, rata-rata masyarakat di Kabupaten Grobogan dapat mengkonsumsi sebanyak 6,28 ons setiap harinya, sedangkan syarat masyarakat di katakan tahan pangan minimal sebanyak 3 ons setiap hari. Angka 6,28 ons lebih dari cukup sebagai syarat masyarakat tahan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bechtold, Karl, Heinz, W. 1988. *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Grobogan. 1996. *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 1996*. Kantor BPS Kabupaten Grobogan.
- Ernawati. 2013. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Swasembada Pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 1968-1992: Suatu Kajian Sejarah Perekonomian*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Khudori. 2008. *Ironi Negeri Beras*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Margono, Sri, dkk. 2010. *Sejarah Pangan di Indonesia: Strategi dan Politik Pangan dari Masa Kolonial sampai Reformasi*. Jakarta: CV. Multi Prima.
- Oudejans, JAN, H.M. 2006. *Perkembangan Pertanian di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan. 1985. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah 1984/1985-1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan. 2002. *Sejarah Kabupaten Grobogan Periode 1998-2001*. Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Purwanto. 2015. *Model Pengurangan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan*. Jakarta: LIPI.
- Rachman, Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa (Dinamika Perjalanan Ppolitik Agraria di Indonesia)*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Sriutomo, Ulilul Rohman Pudji. 2015. *Daya Dukung Pertanian Tanaman Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan Penduduk di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Gajah Mada.
- Tambunana, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia (Beberapa Masalah Penting)*. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Ketahanan Pangan Tahun 1996
- Wasino, Hartatik, Sri, Endah. 2017. *Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan (Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda)*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Wasino, Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Penelitian Sejarah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Sumber Wawancara

- Lilik Agung, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan. Tanggal Wawancara 27 Juli 2017 pukul 09.30-11.15.
- Margini, Petani di Kabupaten Grobogan berusia 64Tahun. Alamat Rumah Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Tanggal Wawancara 5 Agustus 2017 pukul 14.45-16.17.
- Sudharsono, Ketua Badan Penyuluh Pertanian Tahun 1978-2002. Alamat Rumah Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Tanggal Wawancara 27 Juli 2017 pukul 12.15-14.00.